

Urgensi Pendidikan Pariwisata dalam Meningkatkan Pengembangan Wisata Halal di Aceh

***Fakhrul Husni¹, Mohd. Reza Pahlevi², Harmaini³, Muhammad Zikri⁴.**

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam Nusantara, Banda Aceh, Aceh, Indonesia*

^{2,3}*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh, Indonesia*

⁴*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

Email: fakhrulhusni@stainusantara.ac.id

Abstract

This article examines the urgency of strengthening tourism education in supporting the development of halal tourism in Aceh which has great potential, especially due to the implementation of Islamic law which is in line with the principles of halal tourism. The purpose of this study is to identify tourism education and halal tourism development in Aceh. This research uses a descriptive qualitative method with a data analysis approach according to Miles and Huberman which includes the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that although the potential for halal tourism in Aceh is very promising, the aspect of tourism education in this area is still minimal and general in nature. The absence of a focus on education that specifically discuss the concepts, standards, and practices of halal tourism is a major obstacle in producing competent and professional human resources. Therefore, a strategy to strengthen the halal tourism education ecosystem is needed to support the development of sustainable and competitive global tourism in Aceh.

Keywords: *Tourism Education, Halal Tourism, Aceh*

Abstrak

Artikel ini mengkaji urgensi penguatan pendidikan pariwisata dalam mendukung pengembangan wisata halal di Aceh yang memiliki potensi besar, terutama karena penerapan syariat Islam yang selaras dengan prinsip-prinsip wisata halal. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pendidikan pariwisata dan pengembangan wisata halal di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun potensi wisata halal di Aceh sangat menjanjikan, aspek pendidikan pariwisata di daerah ini masih minim dan bersifat umum. Belum adanya fokus pada pendidikan yang secara khusus membahas konsep, standar, dan praktik wisata halal menjadi kendala utama dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekosistem pendidikan pariwisata halal guna mendukung pembangunan pariwisata Aceh yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kata kunci: Pendidikan Pariwisata, Wisata Halal, Aceh

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan nilai-nilai religius yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal (Saleh dan Anisah, 2019). Dengan penerapan syariat Islam secara formal sejak tahun 2002, Aceh tidak hanya menjadi ikon keislaman di Nusantara, tetapi juga menawarkan keunikan budaya lokal yang bersinergi dengan nilai-nilai universal Islam (Pahlevi, 2022), menjadikannya menarik bagi wisatawan Muslim domestik maupun internasional. Dukungan regulasi, budaya masyarakat, serta sumber daya alam yang memadai seharusnya mampu menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan wisata halal nasional bahkan global (Irwansyah dan Zaenuri, 2021). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang kompeten (Muis, 2020).

Kualitas SDM yang terbatas dalam sektor pariwisata menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat optimalisasi potensi wisata halal di Aceh. Keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, pemahaman terhadap standar layanan wisata halal, hingga kompetensi dalam manajemen destinasi pariwisata masih jauh dari harapan (Hasil Observasi, 2023). Masalah ini tidak terlepas dari minimnya institusi pendidikan formal yang secara khusus menyediakan program studi pariwisata di Aceh, terutama yang berbasis pada konsep wisata halal. Ketidadaan basis pendidikan yang kuat menyebabkan regenerasi tenaga profesional di sektor pariwisata berjalan lambat, sedangkan kebutuhan pasar wisata halal terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran global terhadap konsep perjalanan yang sesuai syariat (Fahham, 2017).

Pendidikan pariwisata berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai pelayanan yang berorientasi pada kehalalan, keramahan, kenyamanan, dan keberlanjutan (Akib, 2020). Dalam konteks wisata halal, pendidikan pariwisata harus mampu mengintegrasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyediaan layanan, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, hingga aktivitas wisata (Destiana dan Astuti, 2019). Tanpa pendidikan yang memadai,

penyelenggara wisata dan seluruh pihak terkait sulit untuk memenuhi standar wisata halal internasional yang kini menjadi acuan di banyak negara.

Lebih jauh, pengembangan wisata halal bukan hanya soal menambahkan label "halal" pada produk dan jasa wisata. Pengembangan ini membutuhkan pendekatan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran destinasi, yang semuanya memerlukan SDM profesional dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan wisatawan Muslim (Subarkah, Rachman, dan Akim, 2020). Pendidikan pariwisata yang terstruktur, berbasis kompetensi, dan berwawasan syariah menjadi instrumen vital untuk membangun keunggulan kompetitif Aceh dalam pasar pariwisata global.

Minimnya pendidikan pariwisata di Aceh dapat dilihat dari terbatasnya jumlah program studi pariwisata yang tersedia di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain jumlah yang sedikit, sebagian besar program tersebut masih berfokus pada pariwisata secara umum, belum secara spesifik mengadopsi kurikulum yang relevan dengan standar wisata halal (Hasil Observasi, 2023). Akibatnya, lulusan yang dihasilkan kurang siap dalam memenuhi kebutuhan spesifik sektor wisata halal, seperti standar halal hospitality, halal tour guiding, serta manajemen halal tourism destination. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya frekuensi pelatihan, workshop, atau sertifikasi kompetensi halal tourism bagi praktisi dan calon tenaga kerja di sektor pariwisata.

Dari sudut pandang ekonomi, sektor pariwisata, khususnya wisata halal, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Aceh (Irwansyah dan Zaenuri, 2021). Pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperluas jaringan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis layanan pariwisata (Tanjung, 2019). Namun tanpa dukungan SDM yang berkualitas, semua potensi tersebut hanya akan menjadi peluang yang tidak tergarap maksimal (Rahmi, 2017). Karena itu, pengembangan pendidikan pariwisata menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, tidak hanya oleh lembaga pendidikan, tetapi juga oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Upaya mengembangkan pendidikan pariwisata di Aceh harus dimulai dari perencanaan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip wisata halal,

peningkatan jumlah lembaga pendidikan pariwisata, hingga penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pelaku industri pariwisata sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang relevan dengan dinamika pasar wisata halal. Selain itu, strategi lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang wisata halal, sehingga kebijakan dan program pengembangan pariwisata dapat berbasis data dan kebutuhan nyata.

Dalam perspektif global, negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah membuktikan bahwa penguatan sektor pendidikan pariwisata halal berbanding lurus dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata mereka (Battour dan Ismail, 2016). Malaysia, misalnya, tidak hanya membangun destinasi wisata halal tetapi juga mengembangkan program pendidikan tinggi dan pelatihan pariwisata halal secara masif (Zainal et al. 2012). Hasilnya, Malaysia menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia berdasarkan berbagai indeks global (CNN Indonesia, 2022). Aceh, dengan keunikan nilai-nilai Islaminya, sesungguhnya memiliki peluang yang sama, bahkan lebih besar, apabila mampu menyiapkan SDM yang berkompetensi melalui pendidikan pariwisata yang terarah.

Dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan peluang tersebut, penting bagi semua pihak untuk memandang pendidikan pariwisata bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar utama dalam pengembangan wisata halal di Aceh (Destiana dan Astuti, 2019; Felyana, 2019). Pendidikan yang terarah akan menghasilkan tenaga profesional yang mampu menghadirkan layanan pariwisata berkualitas, meningkatkan daya saing destinasi, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan citra Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan (Agoes, 2020).

Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji secara mendalam urgensi penguatan pendidikan pariwisata dalam rangka meningkatkan pengembangan wisata halal di Aceh, serta menawarkan beberapa rekomendasi strategis untuk mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Afifiddin dan Saebani, 2012). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif partisipan atau subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Metode ini berfokus pada makna, pengalaman, serta pandangan individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Data yang diperoleh berasal dari hasil studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Penulis akan mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan online serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi dengan tema yang dibahas (Sugiarto, 2015).

Metode ini berfungsi untuk melihat aspek penting dari aspek penting Pendidikan Pariwisata yang secara mendalam akan difokuskan pada kebutuhan mengembangkan potensi wisata halal di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yaitu guru sekolah/madrasah, siswa dan masyarakat. Adapun proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data selaras dengan teori Miles dan Huberman yakni: 1) mengumpulkan data, 2) mereduksi data, 3) menyajikan data, dan 4) menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

C. PEMBAHASAN

Pengembangan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya dorongan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia (Muis, 2020). Potensi alam, budaya, dan kekuatan nilai religius yang dimiliki Aceh menjadi modal besar dalam mengembangkan wisata berbasis syariah (Aceh, 2023). Namun, berbagai tantangan struktural, termasuk dalam aspek sumber daya manusia, masih menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.

Salah satu isu krusial yang diidentifikasi adalah minimnya ketersediaan pendidikan pariwisata yang terstruktur dan berbasis standar wisata halal di Aceh. Keterbatasan jumlah lembaga pendidikan, kurangnya program studi khusus pariwisata, serta rendahnya integrasi prinsip syariah dalam kurikulum,

menyebabkan ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi tuntutan industri wisata halal. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan, pengelolaan destinasi, dan citra Aceh sebagai destinasi wisata halal di mata wisatawan.

Pendidikan pariwisata berperan penting dalam mencetak tenaga kerja yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan, khususnya wisatawan Muslim (Sukardi, Wildan, dan Sukri, 2020). Melalui pendidikan yang tepat, calon pelaku pariwisata dapat memahami kebutuhan spesifik wisatawan halal, menguasai standar pelayanan syariah, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan pariwisata di Aceh menjadi strategi fundamental dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor wisata halal di provinsi ini.

Hasil observasi yang dilaksanakan mengidentifikasi bahwa Pendidikan Pariwisata pada jenjang pendidikan di Aceh masih sangat minim. Setiap jenjang pendidikan terkhusus pada Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan tidak difokuskan pada bidang pariwisata, melainkan seperti kejuruan IPA, IPS, Tata Boga, Perhotelan, Teknik Mesin dan lain sebagainya. Uraian ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilaksanakan pada beberapa informan, yang menyebutkan bahwa:

“Kalau ditanya potensi wisata, di sini ada tempat yang bisa dijadikan wisata religi, di sini ada makam Raja Peunaroe, raja di Pidie. Sekarang malah kurang terurus makamnya, apalagi jadi tempat untuk orang kunjungi.” (Wawancara dengan MR selaku masyarakat Kabupaten Pidie).

“Untuk destinasi wisata ya ini pak, Pantai Pelangi kan salah-satu tempat wisata di Pidie. Cuma yang datang ya orang-orang di sini, kalau pengunjung dari luar daerah gak ada, ya mungkin cuma lewat saja ya... Kalau menurut saya, sekarang tata ruang destinasi ini masih kurang bagus, orang jualan dibahu jalan di sepanjang jalan, tempat wisatanya masih kurang perhatian, ya itu versi saya pak.” (Wawancara dengan MA selaku masyarakat Kabupaten Pidie).

“Kami pak kalau belajar soal pariwisata ada, kami sekolah jurusan perhotelan. Kalau soal spesifik pengelolaan wisata, yang kayak bapak sampaikan itu enggak, kami belajar fokus ke perhotelan... Wisata masuk juga namun gak secara mendalam gitu pak”. (Wawancara dengan MIA selaku Siswa di Kabupaten Pidie).

“Kalau di sekolah saya gak ada jurusan pariwisata, saya kan SMA, jadi kalau jurusan itu IPA sama IPS... Kalau belajar pariwisata gak ada”. (Wawancara dengan RH selaku Siswa di Kabupaten Pidie).

Berdasarkan hasil wawancara pada informan dari Kabupaten Pidie, mengidentifikasi bahwasanya daerah ini memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik dalam bentuk wisata religi seperti makam Raja Peunaroe maupun wisata alam seperti Pantai Pelangi, namun pengelolaannya masih kurang optimal akibat minimnya perhatian terhadap perawatan destinasi, buruknya penataan ruang, rendahnya kunjungan wisatawan dari luar daerah, serta terbatasnya pendidikan dan pembelajaran khusus di bidang pariwisata di tingkat sekolah, yang menyebabkan sumber daya manusia di sektor ini belum berkembang secara maksimal. Hal ini juga terjadi pada daerah lainnya, hasil observasi dan wawancara juga mengidentifikasi bahwa pendidikan pariwisata pada jenjang pendidikan di Aceh masih sangat minim, hingga menyebabkan kurangnya SDM yang dapat mengelola dan membangun potensi wisata yang ada. Hasil wawancara yang dilaksanakan mengemukakan bahwa:

“Kalau pengelolaan pariwisata riting itu dikelola oleh masyarakat... Kita lihat ada potensi wisata, jadi kita putuskan untuk kelola dan Alhamdulillah lancar sampai hari ini... Kalau pengelolaan pariwisata riting itu dikelola oleh masyarakat. Iya yang kelola itu pemuda gampong. Pantai riting dibuka pertama sekali itu di 2019 pas baru mulai covid. Sekarang udah 4 tahun berjalan. Kita lihat ada potensi wisata, jadi kita putuskan untuk kelola”. (Wawancara dengan Pengelola Cafe di Pantai Riting Aceh Besar).

“Memang orang jaga gak ada, misal orang jaga khusus tinggal disitu gak ada, kalau pos khusus jaga gak ada... Kalau pergi bersih bersih sesekali ada, Misal ada khusus-khusus datang anak sekolah ya datang masuk terus. Gak ada tempat melapor melapor gitu. Istilahnya gak ada pintu gerbang untuk melapor”. (Wawancara dengan A selaku masyarakat di sekitar Destinasi Wisana Benteng Iskandar Muda Aceh Besar).

“Kita di sini perhotelan, cuman di dalam perhotelan ada di kurikulumnya ya, di kurikulumnya tu ada mengenai kepariwisataan, materi ya di dalam induknya kan hotel, tapi dalam hotel itu ada materi pariwisata, itu pun khusus di kelas satu, iya hanya kelas sepuluh”. (Wawancara dengan I selaku Guru di salah-satu SMK di Kota Sabang).

“Kami jurusan perhotelan, untuk pariwisata tetap belajar karna ada pelajarannya juga...saya ambil jurusan perhotelan karna kan di Sabang potensi wisatanya besar, banyak turis datang dari berbagai negara, juga dari domestik, jadi bisnis perhotelan itu besar peluangnya”. (Wawancara dengan SZ selaku Siswa di Kota Sabang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah seperti Aceh Besar dan Kota Sabang memiliki potensi wisata yang cukup

besar, baik dari segi wisata alam seperti Pantai Riting, maupun wisata sejarah seperti Benteng Iskandar Muda. Di Aceh Besar, pengelolaan Pantai Riting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, khususnya pemuda gampong, dan telah berjalan sejak 2019. Adapun destinasi lain seperti Benteng Iskandar Muda tampak tidak memiliki sistem pengelolaan yang memadai, tanpa petugas tetap, pos jaga, ataupun fasilitas dasar untuk mendukung kunjungan wisatawan. Di sisi lain, di Kota Sabang, pendidikan pariwisata di tingkat sekolah juga masih terbatas. Di SMK, materi pariwisata hanya dimasukkan dalam kurikulum jurusan perhotelan dan hanya diajarkan pada tahun pertama, sementara di sekolah umum seperti SMA tidak ada jurusan atau pelajaran khusus mengenai pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di Aceh dalam mengelola sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal yang saat ini diusung oleh Pemerintah Aceh, masih rendah. Minimnya pendidikan formal di bidang pariwisata membuat pengelolaan wisata belum memenuhi standar profesional, padahal keberhasilan pengembangan wisata halal sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang kompeten, pelayanan yang prima, serta pengelolaan destinasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kualitas pelayanan internasional. Hal ini juga terjadi di Kabupaten/Kota lain seperti Kota Banda Aceh, yang juga sebagai ibukota provinsi. Di Kota Banda Aceh, pendidikan pariwisata sudah diterapkan pada beberapa sekolah terkhusus pada sekolah kejuruan, para siswa jurusan pariwisata ini diajarkan berbagai ilmu bidang wisata seperti rute penerbangan, ticketing, pemandu wisata, citycode. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Belajar itu fokusnya yang pertama itu tentang pemandu wisata, citycode, terus rute penerbangan. Saya lebih maunya atau minat ke ticketing pak”. (Wawancara dengan A selaku Siswa di Kota Banda Aceh).

“Banda Aceh udah banyak tempat wisatanya, tinggal dikelola aja...Kan kalau banyak orang datang ke negara kita ekonominya lebih meningkat gitu, iya dipelajari, itu terkait devisa negara. Belajar pembangunan pariwisata belum, kalau kelas satu kita keliling ke tempat wisata, kemarin udah sempat ke museum Aceh, museum tsunami, PLTD gitu. Rencana kalau setelah lulus jadi tourguide”. (Wawancara dengan R selaku Siswa di Kota Banda Aceh).

“Kami ada lima jurusan; tata tata busana, tata boga, kecantikan, perhotelan dan unit layanan pariwisata... Kelas satu pelajarannya belum terlalu ke kejuruannya. Kalau kelas sebelas kelas dua belas sudah”. (Wawancara dengan IC selaku Guru di Kota Banda Aceh).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kota Banda Aceh, pendidikan pariwisata mulai berkembang melalui program keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) seperti jurusan perhotelan dan unit layanan pariwisata. Beberapa siswa menyebutkan bahwa mereka telah mempelajari berbagai aspek dasar pariwisata seperti pemanduan wisata, city code, rute penerbangan, dan ticketing. Selain pembelajaran di kelas, siswa juga dikenalkan dengan destinasi lokal melalui kegiatan kunjungan lapangan ke objek wisata seperti Museum Aceh, Museum Tsunami, dan kapal PLTD Apung. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya awal untuk membentuk pemahaman siswa terhadap potensi pariwisata lokal serta peran ekonomi yang bisa dihasilkan dari sektor ini, seperti kontribusi terhadap devisa negara dan peningkatan ekonomi daerah.

Namun, meskipun pendidikan pariwisata telah tersedia, pendekatan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum secara spesifik diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata halal. Padahal, Aceh memiliki kekhususan sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, dan telah dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Dalam konteks teori wisata halal, seperti yang dijelaskan oleh Battour & Ismail, wisata halal mencakup tidak hanya aspek fisik seperti makanan halal, tempat ibadah, dan pemisahan gender dalam fasilitas umum, tetapi juga aspek pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam interaksi, bahasa, hingga cara berpakaian dan penyampaian informasi wisata. Untuk dapat memenuhi standar ini, diperlukan SDM yang tidak hanya memahami praktik umum dalam pariwisata, tetapi juga memiliki kompetensi khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan wisata.

Sayangnya, hal ini belum tercermin dalam kurikulum atau materi pembelajaran di sekolah-sekolah vokasi di Banda Aceh. Informan menyebutkan bahwa materi kejuruan baru diajarkan secara lebih mendalam mulai kelas XI dan XII, dan hingga saat ini belum ada fokus pembelajaran yang diarahkan khusus untuk pengelolaan wisata halal. Akibatnya, meskipun potensi wisata halal di Aceh besar, kesiapan dari sisi sumber daya manusia yang seharusnya dibentuk melalui jalur pendidikan masih terbatas dan belum menjawab kebutuhan industri secara menyeluruh.

Jika ditelaah lebih mendalam, pariwisata halal memiliki peran strategis bagi Aceh karena provinsi ini merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, sehingga pengembangan wisata berbasis nilai-nilai Islami bukan hanya relevan secara budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 yang diterbitkan oleh Mastercard-CrescentRating, sektor pariwisata halal terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan jumlah wisatawan Muslim global diproyeksikan mencapai 230 juta orang pada tahun 2028. Indonesia sendiri telah beberapa kali masuk dalam peringkat teratas sebagai destinasi wisata halal global. Dalam konteks ini, Aceh memiliki peluang besar untuk mengambil posisi strategis, terutama dengan kekayaan budaya Islam, sejarah, kuliner halal, serta berbagai situs religius dan destinasi alam yang menarik.

Namun untuk dapat bersaing secara global, destinasi wisata halal harus memenuhi standar tertentu, seperti ketersediaan makanan bersertifikasi halal, akomodasi ramah muslim, fasilitas ibadah, serta pelayanan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan wisata halal di Aceh tidak hanya akan memperkuat identitas daerah, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta memperluas jaringan ekonomi syariah di sektor pariwisata. Keberhasilan ini tentu sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan pariwisata yang mendukung secara menyeluruh.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Aceh memiliki potensi wisata yang besar, termasuk dalam sektor wisata halal yang secara alami didukung oleh penerapan syariat Islam di daerah tersebut, pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pendidikan. Pendidikan pariwisata di Aceh masih tergolong minim dan bersifat umum, belum secara khusus membahas atau mengarahkan pembelajaran pada konsep dan praktik wisata halal. Akibatnya, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik dalam pengelolaan wisata halal masih

rendah, sehingga menjadi penghambat utama dalam mewujudkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang unggul dan berstandar internasional.

Untuk mendukung pengembangan wisata halal di Aceh, diperlukan penguatan kurikulum pendidikan pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah, pendirian pusat pelatihan dan sertifikasi wisata halal, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan khusus dan memberikan insentif guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memenuhi standar pelayanan wisata halal secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Safrina-Seuramoe Informasi Pemerintah. 2023. "Pemerintah Aceh Tingkatkan SDM di Bidang Pariwisata." Banda Aceh. <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/pemerintah-aceh-tingkatkan-sdm-di-bidang-pariwisata>.
- Afifiddin, dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agoes, Adrian. 2020. "Peran Lembaga Pendidikan Pariwisata di Era Digital Tourism." *Tourism Scientific Journal* 5 (2): 183–95. <https://doi.org/10.32659/tsj.v5i2.93>.
- Akib, Erwin. 2020. "Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri." *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)* 2 (1): 1–8. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v2i1.40>.
- Battour, M, dan M. N. Ismail. 2016. "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future." *Tourism Management Perspectives* 19: 150–54.
- Destiana, Riska, dan Retno Sunu Astuti. 2019. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *COPAS: Conference on Public Administration and Society* 01 (01): 331–53.
- Fahham, A Muchaddam. 2017. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8 (1): 65–79.
- Felyana, Wazni. 2019. "Dampak Pengembangan Objek Wisata Halal terhadap Kehidupan Sosial dan Pendapatan Pedagang di Kapal Apung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2017." In *Skripsi*, 1–144. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Indonesia, CNN. 2022. "Malaysia Peringkat 1 Wisata Halal GMTI, Indonesia di Posisi 2." <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220602172817-269->

804067/malaysia-peringkat-1-wisata-halal-gmti-indonesia-di-posisi-2.

- Irwansyah, dan Muchamad Zaenuri. 2021. "Wisata Halal: Strategi Dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh." *Juournal of Governance and Social Policy* 2 (1): 41–55. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1>.
- Miles, Mathew B, dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Muis. 2020. "Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh." *Jurnal Adabiya* 22 (1): 41–55. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>.
- Pahlevi, Mohd. Reza. 2022. "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh." *Community* 8 (2): 150–61.
- Rahmi, Nanda. 2017. "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 8 (1): 577–89. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.194>.
- Saleh, Rahmat, dan Nur Anisah. 2019. "Pariwisata Halal Di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan." *SAHAFA Journal of islamic Communication* 1 (2): 79–92. <http://lifestyle.liputan6.com>.
- Subarkah, Alwafi Ridho, Junita Budi Rachman, dan Akim. 2020. "Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* 4 (2): 84–97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukardi, Wildan, dan Akhmad Sukri. 2020. "Pendidikan Bagi Masyarakat Kategori Marginal Kawasan Pariwisata: Aplikasi Pendidikan Berbasis Praktik Sosial." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 3 (2): 109–13. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v3i2.462>.
- Tanjung, Intan Silvia. 2019. "Dampak Objek Wisata Religi Terhadap Pendapatan Dan Peluang Usaha Pedagang Di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman Dan Makam Syiah Kuala." In *Skripsi*, 1–66. Banda Aceh: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zainal, A., S. M Radzi, R Hashim, C. T Chik, dan R Abu. 2012. *Current Issues in Hospitality and Tourism: Research and Innovations*. CRC Press.